

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

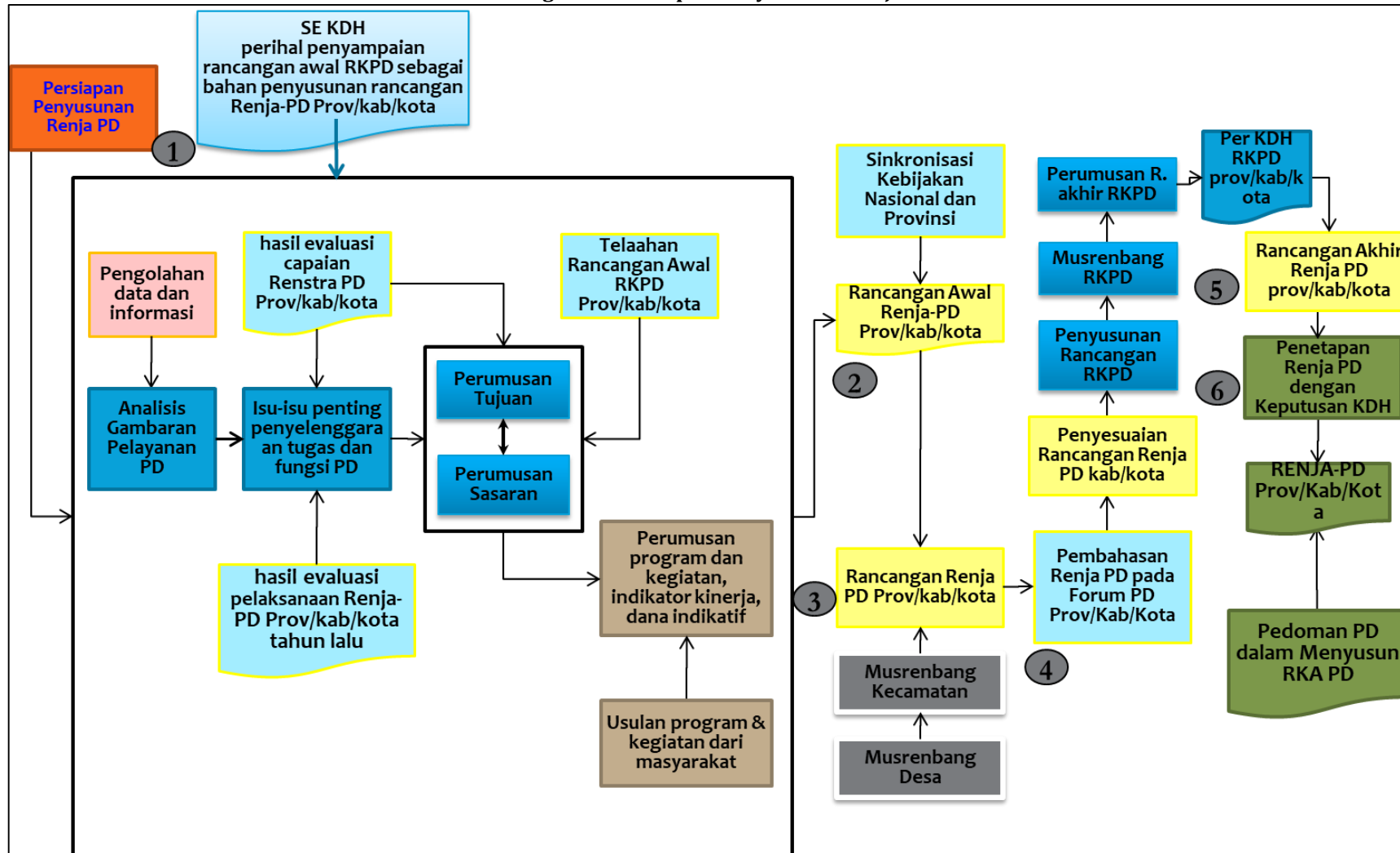
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Pangarengan
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renjadilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemantapan pemulihan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pangarengan Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangarengan Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

## **BABI PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian ,dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Pangarengan.

#### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kecamatan Pangarengan sebesar Rp. 1.996.463.795,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.731.121.620,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 265.342.175,- . Total terealisasi sebesar Rp. 1.886.925.432,- (93,51%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.614.623.232,- (93,27) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 252.302.200,- (95,09). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (Lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 KecamatanPangarenganKabupaten Sampang**

No	Sasaran / Program / Kegiatan	AlokasiBiaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.731.121.620,00</b>	<b>1.614.623.232,00</b>	93,27%				
	- Gaji dan Tunjangan	1.248.121.620,00	1.238.110.879,00	99,20%	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 Bulan	14 bulan	100 %
	- Tambahan penghasilan PNS	483.000.000,00	376.512.353,00	77,95%				
	<b>JUMLAH BTL</b>	<b>1.731.121.620,00</b>	<b>1.614.623.232,00</b>	93,27%				
II	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>	265.342.175,00	252.302.200,00	95,09 %				
1.1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	134.890.175,00	129.197.450,00	95,78 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan jasa Perkantoran	100,00%	100,00%	100 %

<b>1.1.1</b>	<b>Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantorn</b>	<b>101.614.300,00</b>	<b>98.587.400,00</b>	<b>97,02 %</b>				
	Honorarium Tim/panitia pelaksanaan Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00%				
	Belanja Alat Tulis Kantor	535.800,00	534.700,00	99,79 %	Jumlah Suarat Yang terkirim	400 Surat	400 Surat	100 %
	Belanja Air	3.600.000,00	2.520.000,00	70,00 %	Pembayaran Air	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Belanja Listrik	7.200.000,00	6.998.700,00	97,20 %	Pembayaran air	12 bulan	12 Bulan	100 %
	Belanja surat kabar/ Majalah	2.160.000,00	1.920.000,00	88,89 %	Pembayaran surat kabar/ Majalah	12 Bulan	12 bulan	100 %
	Belanja kawat/ Faksimili/ Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	Pembayaran Internet	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	1.121.000,00	67,94 %	Pembayaran PKB Kendaraan dinas	9 unit	9 Unit	100 %
	Belanja Cetak	1.696.000,00	1.696.000,00	100,00%	Jumlah Bahan Cetak dan Peggandaaan	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
	Belanja Peggandaan	742.500,00	742.000,00	99,93 %				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	100,00%	Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan tamu	8 kl Keg	8 kl Keg	100 %
	Belanja Makanan dan Minuman tamu	180.000,00	180.000,00	100,00%				
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00%	Jumlah makan dan Muniuman Kegiatan	12 kl keg	12 kl keg	100 %
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	2.775.000,00	74,00 %				
	Belanja Upah Pekerja	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	Jasa	48 org bln	48 org bln	100 %
<b>1.1.2</b>	<b>Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran</b>	<b>16.625.910,00</b>	<b>16.615.050,00</b>	<b>99,93 %</b>				
	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%				
	Belanja alat tulis kantor	4.717.000,00	4.716.600,00	99,93 %	Jumlah alat Tulis	332 item/ 635 buah	332 item/ 635 buah	100 %
	Belanja Alat listrik dan Elektronik	1.846.500,00	1.846.500,00	100,00%	Jumlah Peralatan Listrik/ Penerangan	9 item/ 51 Buah	9 item/ 51 Buah	100 %
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	100,00%	Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2 Item/ 300 bh	2 Item/ 300 Bh	100 %
	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	3.162.245,00	3.152.950,00	99,71%	JumlahPeralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	18 Item/ 87 Buah		
<b>1.1.3</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>13.995.000,00</b>	<b>84,05 %</b>				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%				
	Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi s dalam daerah	72 org	72 org	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	5.595.000,00	67,82 %	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	6 org	6 org	
<b>1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>87.965.360,00</b>	<b>84.005.150,00</b>	<b>95,50 %</b>				
1.2.1	Pembangunan/Rehah/ Pemeliharaan Gedung Kantor	11.933.610,00	11.933.500,00	100,00%				
	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.833.610,00	6.833.610,00	100,00%				
	Belanja Upah Pekerja	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00%				
1.2.2	Pembangunan/Rehah/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	3.341.750,00	3.341.750,00	100,00%				
	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.541.750,00	2.541.750	100,00%				
	Belanja Upah Pekerja	800.000,00	800.000,00	100,00%				
1.2.3	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	69.600.000,00	66.000.000,00	94,83 %				
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00%	Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang di Sewa	1 Unit	1 Unit	
1.2.4	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	3.090.000,00	2.730.000,00	88,35 %	Jumlah Pengadaan Bendera Spanduk/ Umbul-umbul	20 Unit	20 Unit	

1.3	<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.4		<b>13.072.965,00</b>	<b>11.144.500,00</b>	<b>85,25 %</b>				
1.4.1	Penyusunan laporan kinerja dan Keuangan	7.518.000,00	6.213.000,00	82,64 %				
	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	3.105.000,00	71,88%				
	Belanja alat tulis Kantor	408.000,00	408.000,00	100,00%				
	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%				
	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100,00%				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	630.000,00	540.000,00	85,71%				
1.4.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran	4.478.000,00	3.855.500,00	86,10 %				
	Uang Lembur PNS	363.000,00	363.000,00	100,00%				
	Belanja alat tulis Kantor	363.000,00	363.000,00	100,00%				
	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%				
	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	100,00%				
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	630.000,00	630.000,00	100,00%				
1.5	<b>Program Peningkatan Pelayan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>29.413.640,00</b>	<b>27.955.100,00</b>	<b>95,04 %</b>				
1.5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	2.056.440,00	2.056.440,00	100,00%				
	Belanja Bahan Baku bangunan	1.056.440,00	1.056.440,00	100,00%				
	Belanja Upah Pekerja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
1.5.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat terhadap keamanan lingkungan	2.668.000,00	2.668.000,00	100,00%				
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.132.000,00	2.132.000,00	100,00%				
	Belanja bahan Bakar Minyak/ Gas	210.000,00	210.000,00	100,00%				
	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	100,00%				
	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	100,00%				
	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
1.5.3	Pembinaan dan monitoring pelayanan Administrasi Desa	8.558.000,00	7.100.000,00	82,96 %				
	Honorarium Tim/ Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00%				
	Belanja Alat Tulis Kantor	265.500,00	-	0,00%				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	150.00,00	-	0,00%				

	Belanja Cetak	210.000,00	-	0,00%				
	Belanja Penggandaan	33.000,00	-	0,00%				
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	-	0,00%				
1.5.4	Fasilitas Pelaksanaan Musrembang RKPD di Kecamatan	14.909.600,00	14.909.600,00	100.00%				
	Belanja Alat Tulis kantor	604.600,00	604.600,00	100.00%				
	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%				
	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	100.00%				
	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	100.00%				
	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	100.00%				
	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	1.400.000,00	100.00%				
	Belanja Sewa sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%				
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.695.000,00	9.695.000,00	100.00%				
	Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah	630.000,00	630.000,00	100.00%				
1.5.5	Fasilitas administrasi pelayanan Umum	1.201.100,00	1.201.100,00	100.00%				
	Belanja Alat Tulis Kantor	661.100,00	661.100,00	100.00%				
	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	100.00%				
	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	100.00%				
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.996.463.795,00</b>	<b>476.956.800,00</b>	<b>93,51 %</b>				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 93,51% atau dapat dikategorikan sangat baik.

### 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Pangarengan sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangarengan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangarengan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020**

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	<b>Tujuan:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1	Nila IKM	-	81,05					81,05	81,05	100
	<b>Sasaran:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan		1	Nila IKM Kecamatan Pangarengan	-	81,05					81,05	81,05	100
4.05.		<b>FUNGSI PENUNJANG LANNYA</b>											
4.05.4.05.13.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00					100	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00					100	100	100
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100.00					100	100	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.13.37.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibu kota kecamatan	pkt	1					1	1	100
4.05.4.05.13.37.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	18					18	18	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	18					18	18	100
4.05.4.05.13.37.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	18					18	18	100
			2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	desa	18					1	1	5,55
4.05.4.05.13.37.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%	100					100	100	100
4.05.4.05.13.37.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Jumlah pramusrenbangcam	Kali	6					1	1	16,67
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	6					1	1	16,67
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	6					1	1	16,67

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.13.01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.13.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	5.595					400	400	7,14
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air	bulan	72					12	12	16,67
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	70					13	13	18,57
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	Ob	72					14	14	16,67
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	350					93	93	26,57
4.05.4.05.13.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	buah	5.678					2929	2929	51,58
			2	Jumlah barang cetakan	Buah	2.500					470	470	18,8
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	48.000					10.000	10.000	20,83
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	buah	200					104	104	52
			5	Jumlah spanduk/ umbul-umbul/ bendera yang disediakan	buah	450					254	254	56,4



Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			6	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Bulan	72					12	12	16,67
			7	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	Ok	4500					600	600	13,33
4.05.4.05.13.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	Ok	432					75	75	17,36
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	Ok	52					7	7	13,86
<b>4.05.4.05.13.02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.05.4.05.13.02.01.		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.13.02.02		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.13.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang dipelihara	unit	1					1	1	100,00
4.05.4.05.13.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah peralatankantor yang diadakan	unit	21					9	9	42,85
			2	Jumlah peralatankantor yang dipelihara	unit	21					19	19	90,47
			3	Jumlah perlengkapan kantordiadakan	unit	41					31	31	75,60

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.13.04		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.13.04.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dokumen	6					1	1	16,67
			2	Jumlah laporan Triwulan	Dokumen	6					1	1	16,67
			3	Jumlah laporan Semester	Dokumen	6					1	1	16,67
			4	Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dokumen	6					1	1	16,67
			5	Jumlah LKjIP	Dokumen	6					1	1	16,67
			6	Jumlah laporan SAKIP	Dokumen	6					1	1	16,67
4.05.4.05.13.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	6					1	1	16,67
			2	Jumlah dokumen Renja	Dokumen	6					1	1	16,67
			3	Jumlah RKA SKPD	Dokumen	6					1	1	16,67
			4	Jumlah DPA SKPD	Dokumen	6					1	1	16,67
4.05.4.05.13.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah dokumen SKM	Dokumen	6					1	1	16,67
			2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	Kali	6					1	1	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangarengan sampai dengan Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Pangarengan yang baru.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pangarengan dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang**

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangarengan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>tujuan</b>											
	<b>sasaran</b>											
1	Presentase desa Maju				100	100			95	100	100	
2	Indeks kepuasan masyarakat				100	100			100	100	100	
3	Presentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik				20	20			20	50	50	
4	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa				100	100			100	100	100	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan				100	100			100	100	100	
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa				100	100			20	20	20	

### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Pangarengan sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sebagaimana terdapat dalam Renstra Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pangarengan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

## **2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor-faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangarengan berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

## **2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
<b>7.01.7.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	3.836.630.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	3.836.630.000
<b>7.01.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				22.000.000	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				22.000.000
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	5.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	5.000.000
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen, LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	9 dok	7.000.000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen, LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	9 dok	7.000.000
<b>7.01.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				3.159.950.000	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				3.159.950.000
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Pangarengan	Jumlah gaji ASN, TPP, Honor pengelola keuangan	14 Bulan	3.134.950.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Pangarengan	Jumlah gaji ASN, TPP, Honor pengelola keuangan	14 Bulan	3.134.950.000
7.01.07.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Pangarengan	Jumlah penyediaan ATK	15 Jenis	10.000.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Pangarengan	Jumlah penyediaan ATK	15 Jenis	10.000.000
7.01.07.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub	5.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub	5.000.000

Renja Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	keuangan SKPD			kegiatan		pengujian/ verifikasi keuangan			kegiatan	
7.01.07.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dok	5.000.000
7.01.07.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen laporan bulananan / triwulan /semester	3 Dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan/triwulan/semester	Kec. Pangarengan	Jumlah dokumen laporan bulananan / triwulan /semester	3 Dok	5.000.000
<b>7.01.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Pangarengan			8.600.000	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Pangarengan			8.600.000
7.01.07.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Pangarengan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.600.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Pangarengan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.600.000
<b>7.01.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Pangarengan			<b>81.780.000</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Pangarengan			<b>81.780.000</b>
7.01.07.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Pangarengan	Jumlah komponen listrik	9 Jenis	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Pangarengan	Jumlah komponen listrik	9 Jenis	4.000.000
7.01.07.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Pangarengan	Jumah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	18 Jenis	13.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Pangarengan	Jumah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	18 Jenis	13.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangarengan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangarengan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	3.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Pangarengan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7 Jenis	6.360.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanP erundang-	Kec. Pangarengan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7 Jenis	6.360.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
						undang				
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Pangareng an	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0b	5.400.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Pangar engan	Jumlah main tamu yang disediakan	120 0b	5.400.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangareng an	Jumlah BBM Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rako rdalam Daerah RakorLuar Daerah	8667 liter 720 ok 52 ok, 6 ok	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangar engan	Jumlah BBM Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor dalam Daerah Rakor Luar Daerah	8667 liter 720 ok 52 ok, 6 ok	50.000.000
<b>7.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Pangareng an		100%	<b>240.500.000</b>	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Pangar engan		100%	<b>240.500.000</b>
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Kec. Pangareng an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	72.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pangar engan	Jumlah Kendaraan DinasOperasional yang disediakan	1 unit	72.000.000
7.01.01.2.0 7.06	PengadaanPeralatandanMesin Lainnya	Kec. Pangareng an	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	10 unit	168.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pangar engan	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	10 unit	168.500.000
<b>7.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Pangareng an			89.500.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Pangar engan			89.500.000
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangareng an	JumlahSurat yang terkirim	400 surat	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangar engan	Jumlah Surat yang terkirim	400 surat	3.500.000
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangareng an	Cakupan Pemenuhan Air danListrik	2 Jenis	35.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangar engan	Cakupan Pemenuhan Air dan Listrik	2 Jenis	35.000.000
7.01.01.2.0 8.04	PenyediaanJasaPelayananUm um Kantor	Kec. Pangareng an	Jumlahtenagakebersihan, petugasadministrasidanpenjagamalam	5 0b	<b>51.000.000</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangar engan	Jumlah tenaga kebersihan, petugas	5 0b	<b>51.000.000</b>

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
								administrasi dan penjaga malam		
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Pangarengan		100%	198.300.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Pangarengan		100%	198.300.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangarengan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	<b>100 Unit</b>	<b>4.500.000</b>	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Pangarengan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	<b>100 Unit</b>	<b>4.500.000</b>
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Pangarengan	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	3.800.000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Pangarengan	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	3.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pangarengan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	15.000.000	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Kec. Pangarengan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	15.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangarengan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	175.000.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Pangarengan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	175.000.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec. Pangarengan			<b>36.000.000</b>	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Pangarengan			<b>36.000.000</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Pangarengan			36.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kec. Pangarengan			36.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pangarengan			5.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pangarengan			5.000.000



Kode	RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Pangarengan			5.000.000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Pangarengan			5.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	Kec. Pangarengan	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina	Kec. Pangarengan	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	5.000.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Pangarengan			98.800.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Pangarengan			98.800.000
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Pangarengan			98.800.000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Pangarengan			98.800.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangarengan	Laporan hasil musrembangcam musrembangcam pelaksanaan pramusrembangcam	1 dok 1 kl 1 kl	32.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pangarengan	Laporan hasil musrembangcam musrembangcam pelaksanaan pramusrembangcam	1 dok 1 kl 1 kl	32.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangarengan	Jumlah desa binaan pkk	3 desa	66.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangarengan	Jumlah desa binaan pkk	3 desa	66.800.000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Pangarengan			8.000.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Pangarengan			8.000.000
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Pangarengan			8.000.000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Pangarengan			8.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHANKECAMATAN PANGARENGAN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangarengan	Jumlah poskamlig yang aktif jumlah siskampling yang aktif	6 desa 6 desa	8.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangarengan	Jumlah poskamlig yang aktif jumlah siskampling yang aktif	6 desa 6 desa	8.000.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Pangarengan			47.500.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Pangarengan			47.500.000
<b>7.01.06.2.0 1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Pangarengan			47.500.000	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Pangarengan			47.500.000
7.01.06.2.0 1.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pangarengan	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	6 desa	7.500.000	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pangarengan	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	6 desa	7.500.000
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangarengan			10.000.000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangarengan			10.000.000
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Pangarengan	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	2 desa	30.000.000	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Pangarengan	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	2 desa	30.000.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangarengan Tahun 2022.

## 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kecamatan Pangarengan Tahun 2022**

Perangkat Daerah: Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Pangarengan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) Tahun 2022 dengan Tema dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sesuai dengan berbagai permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2022, maka tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 adalah “Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini adalah pemulihan ekonomi sosial masyarakat sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan utama pembangunan yaitu Sampang Hebat dan Bermartabat. Penentuan tema ini juga selaras dengan tema dalam RKP nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Keselarasan tema pembangunan antara level pemerintahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pangarengan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1**  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
11	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah.
			<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pangarengan Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangarengan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Pangarengan Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pangarengan pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	<b>Tujuan:</b>		
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan public</b>	<b>Nilai IKM</b>	81,55
	<b>Sasaran:</b>		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Pangarengan	81,55

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Pangarengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Pangarengan mendukung pada pencapaian 3 misi yaitu :

**Misi 2** yaitu *mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif*

**misi 4** yaitu *“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”*.

**Misi 5** yaitu *“ Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, damai dan bersatu”*

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangarengan yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra

<b>Misi 2 :</b> mewujudkan kemandirian ekonomi	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	<b>Program :</b> Program pemberdayaan masyarakat dan desa
---	--	--

daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif		
<b>misinya 4 :</b> Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan	<b>Program :</b> 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, damai dan bersatu	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	<b>Program :</b> Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pangarengan Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangarengan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi <https://sampangkab.sipd.kemendagri.go.id>

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pangarengan mengampu urusan Fungsi Penunjang Lainnya, Program Kecamatan Pangarengan pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangarengan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangarengan Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.7.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			<b>3,836,630,000</b>
7.01.07.01.2.01	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>22,000,000</b>
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	5,000,000
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dok	5,000,000
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dok	5,000,000
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen, LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	9 dok	7,000,000
7.01.07.01.2.02	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>			<b>3,159,950,000</b>
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN, TPP, Honor pengelola keuangan	14 bulan	3,134,950,000
7.01.07.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penyediaan ATK	15 jenis	10,000,000
7.01.07.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ SKPD yang diverifikasi	33 sub kegiatan	5,000,000
7.01.07.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	5,000,000



7.01.07.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan/triwulan/semester	Jumlah dokumen laporan bulananan / triwulan /semester	3 dok	5,000,000
7.01.07.01.2.05	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>			<b>8,600,000</b>
7.01.07.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8,600,000
7.01.07.01.2.06	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			<b>81,780,000</b>
7.01.07.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	9 jenis	4,000,000
7.01.07.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	18 jenis	13,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	3,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7 jenis	6,360,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah main tamu yang disediakan	120 ob	5,400,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor dalam Daerah Rakor Luar Daerah	8667 liter 720 ok 52 ok 6 ok	50,000,000
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>240,500,000</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	72,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	10 unit	168,500,000
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>89,500,000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	400 surat	3,500,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Air dan Listrik	2 jenis	35,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	5 ob	51,000,000
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>198,300,000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	10 unit	4,500,000

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	40 unit	3,800,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	15,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	175,000,000
7.01.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>36,000,000</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			36,000,000
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>5,000,000</b>
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>5,000,000</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizina	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	5,000,000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>98,800,000</b>
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>98,800,000</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporah hasil musrembangcam musrembangcam pelaksanaan pramusrembangcam	1 dokumen 1 kali 1 kali	32,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan pkk	3 desa	66,800,000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>8,000,000</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>8,000,000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah poskamlig yang aktif jumlah siskampling yang aktif	6 desa 6 desa	8,000,000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>47,500,000</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>			<b>47,500,000</b>

---

<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				
7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	6 desa	7,500,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10,000,000
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	2 desa	30,000,000

---

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan serta 33 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatannya itu di Kecamatan Pangarengan dalam lingkup Kabupaten Sampang.

## **BAB V PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pangaengan Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Pangaengan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pangaengan Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangaengan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Pangaengan Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Kecamatan Pangaengan adalah :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
3. Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada tanggap, tertib, damai dan bersatu

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Acuan bagi para stakeholders dalam menyusun dan melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan;
2. Acuan dalam menetapkan target-target kinerja pembangunan Perangkat Daerah dan instrumen evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah;
3. Sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

**CAMAT PANGARENGAN**

**H.R Syamsul Arifin, SE  
Pembina  
Nip.19640402 198603 1 023**

